

## **DAMPAK PERMASALAHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA DI ERA OTONOMI DAERAH**

*(The Impact of Industrial Relation Issues on Indonesian Economy in The Era of Regional Autonomy)*

**Evi Lisna<sup>1)</sup>, Bonar M. Sinaga<sup>2)</sup>, Sjafrri Mangkuprawira<sup>2)</sup>, dan Hermanto Siregar<sup>2)</sup>**

### **ABSTRACT**

*This study is aim to analyze the expost (2001-2004) and exante (2007-2010) impacts of industrial relation issues on Indonesian economy in the era of regional autonomy. To reach this objective, a simultaneous equations model containing 34 stuctural equations and 18 identity equations is constructed. Time series 1980-2004 data was used in this study and model was estimated by 2SLS Method, SYSLIN Procedure. Historical and forcasting simulation used the SIMNLIN Procedure. Estimated parameters of the model suggest that an increase of minimum wage policy, emergence of labour union and strike cases affect significantly on investment, agregate supply, unemployment and inflation. Results of the simulations analysis indicate that solving industrial relation issues is potential to increase investment and agregate supply as well as to decrease unemployment and inflation in 2007-2010.*

*Key words: industrial relation issues, economy, regional autonomy*

### **PENDAHULUAN**

Terdapat dua hal penting yang perlu mendapat perhatian dalam penerapan kebijakan ketenagakerjaan dewasa ini. Pertama, diberlakukannya otonomi daerah (otda) sejak tahun 2001 telah mengubah sistem pengambilan keputusan dalam penetapan kebijakan upah minimum. Kedua, era kebebasan berserikat memunculkan banyak serikat buruh yang merupakan representasi buruh dalam hubungan industrial. Kedua hal tersebut telah membuka peluang bagi pekerja dan serikat pekerja untuk berpartisipasi dalam perubahan kebijakan ketenagakerjaan.

Pada kenyataannya peluang partisipasi serikat pekerja dalam penetapan kebijakan ketenagakerjaan belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Salah satu faktor penyebab kecilnya peluang partisipasi serikat pekerja adalah kebijakan pemerintah yang membuat mekanisme penentuan kebijakan itu sendiri yang tidak demokratis bagi buruh (Wirahyoso, 2002). Hasil jajak pendapat yang telah dilakukan Kompas (Mei 2007) tentang posisi pekerja, pengusaha, dan pemerintah memperkuat pernyataan tersebut. Sebanyak 73,6% dari 832 sampel pekerja menjawab bahwa peran pemerintah dalam penetapan standar upah minimum tidak memadai. Lebih jauh dinyatakan sebanyak 76,3% pekerja menganggap penetapan upah minimum yang layak oleh pemerintah belum memadai. Jajak pendapat tersebut menyimpulkan bahwa sebahagian responden menganggap seluruh kebijakan ketenagakerjaan selama ini lebih banyak merugikan pekerja

---

<sup>1)</sup> Staf pengajar pada Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Univ. Syiah Kuala, NAD

<sup>2)</sup> Staf pengajar dan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

(Sultan, 2007). Meskipun pemerintah dan pengusaha memberi peluang kepada pekerja untuk menuntut hak melalui kebebasan berserikat, perjuangan pekerja selama ini terperangkap di antara kepentingan pemerintah dan pengusaha. Perusahaan cenderung membuat aturan yang dapat menekan kesejahteraan pekerja untuk mempertahankan keuntungan, sedangkan pemerintah cenderung membatasi upah minimum pekerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi.

Tidak adanya dampak negatif bagi pekerja dan pengusaha serta tidak memperburuknya kondisi perekonomian adalah harapan para pelaku ekonomi dalam memikirkan dan merealisasikan kebijakan ketenagakerjaan. Namun, gejala ketenagakerjaan dewasa ini memang nyata terjadi. Berbagai tuntutan pekerja untuk memperoleh imbalan kerja selalu menimbulkan ketegangan di antara pihak pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Kuat dugaan bahwa ketiga pihak kokoh memperjuangkan kepentingan masing-masing sehingga penyelesaian kasus hubungan industrial menjadi konflik yang berkepanjangan.

Gejolak ketenagakerjaan yang relatif sering terjadi adalah pemogokan atau unjuk rasa. Banyaknya kasus pemogokan setiap tahun (Tabel 1) mencerminkan adanya (1) ketidakpuasan di kalangan pekerja karena tuntutan pekerja tidak dipenuhi pihak perusahaan dan (2) ketidakharmonisan hubungan antara pekerja dan pengusaha.

Tabel 1. Perkembangan kasus pemogokan era otda

Tahun	Kasus pemogokan (kasus)	Tenaga kerja terlibat (orang)	Jam kerja hilang (jam)
2001	174	109.845	1.165.032
2002	220	97.325	769.142
2003	161	68.114	648.253
2004	112	48.092	497.780

Sumber: Depnakertrans, Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial (2007)

Penyebab utama dari sejumlah kasus pemogokan selama era otda bersumber dari ketidakpuasan pekerja tentang upah. Hasil penelitian Depnakertrans (2005) menunjukkan faktor utama pemicu kasus pemogokan tenaga kerja adalah masalah upah yang tidak mencukupi biaya hidup pekerja. Hal ini dapat dipahami karena meskipun setiap tahun pemerintah telah berupaya melakukan penyesuaian upah minimum yang secara nominal terus meningkat, nilai riil hanya mampu memenuhi rata-rata 89,63% dari kebutuhan hidup minimum (BPS, 2006). Beberapa faktor penyebab lain kasus pemogokan adalah ketidakpuasan kerja, perlakuan tidak adil, tuntutan perbaikan fasilitas dan tunjangan kerja, permasalahan gender, masalah uang Jamsostek, dan penolakan terhadap metode kerja baru yang diterapkan perusahaan. Berdasarkan sektor, jumlah kasus pemogokan lebih sering terjadi pada sektor industri (Tabel 2).

Tabel 2. Perkembangan kasus pemogokan sektoral era otda

Sektor	2001	2002	2003	2004
Pertanian	6	3	1	2
Industri	127	163	125	91
Jasa	28	52	33	16
Lain	13	2	2	3
Total	174	220	161	112

Sumber : Depnakertrans, Ditjen Binawas (2007).

Pada dasarnya pemogokan tenaga kerja (TK) dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan UU No. 13 tahun 2003. Dinyatakan bahwa pemogokan TK dapat dibenarkan bila dilakukan secara sah, tertib, damai, dan sebagai akibat gagalnya perundingan. Namun, pada kenyataannya, kasus pemogokan TK yang terjadi tidak selaras dengan yang diatur dalam UU ketenagakerjaan. Kasus pemogokan relatif sering terjadi disertai dengan tindakan pengrusakan fasilitas perusahaan, fasilitas umum, dan gangguan kepentingan umum.

Maraknya kasus pemogokan dewasa ini tidak dapat dipandang hanya sebagai masalah antara pihak pekerja dan pihak perusahaan dalam proses produksi. Masalah kasus pemogokan terkait dan mempengaruhi keadaan perekonomian, kestabilan politik, keamanan, produktivitas kerja, dan perkembangan investasi. Artinya perubahan keseimbangan di pasar TK berdampak pada perubahan keseimbangan makro.

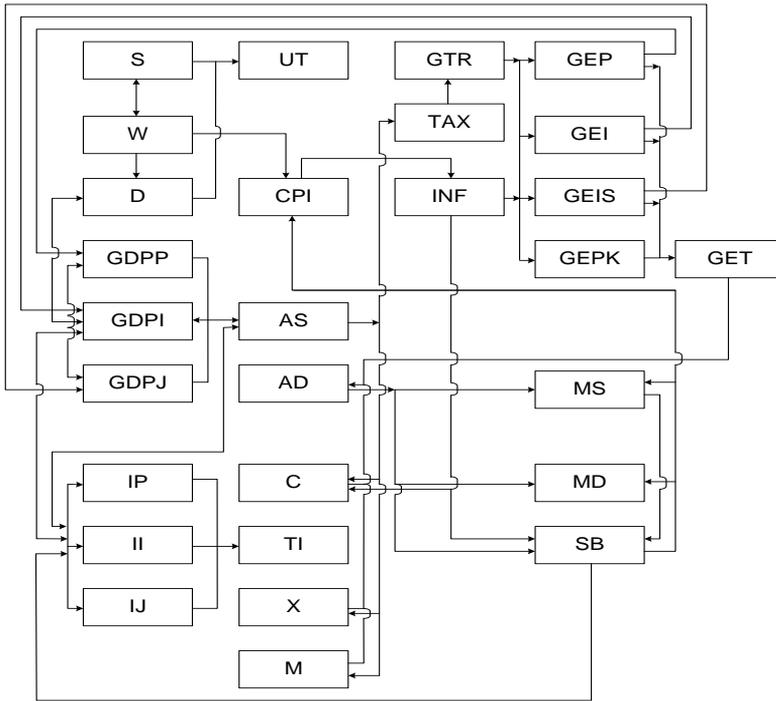
Terkait dengan investasi, pemerintah telah mencoba memperbaiki iklim investasi melalui reformasi kebijakan ketenagakerjaan. Sebagai contoh, rencana reformasi Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kenyataannya rencana reformasi UU tersebut memicu permasalahan baru dalam hubungan pihak pekerja dengan pengusaha. Sumber pemicu unjuk rasa pekerja adalah kekhawatiran reformasi kebijakan ketenagakerjaan akan menciptakan pasar tenaga kerja yang fleksibel dan dapat berdampak pada semakin rentannya hak pekerja (Arsyad, 2007 dalam Setiawan, 2007).

Studi ini menjawab permasalahan bagaimana dampak permasalahan hubungan industrial terhadap perekonomian makro pada era otda di masa lalu (2001-2004) dan di masa yang akan datang (2007-2010). Hubungan industrial diproksi dengan variabel-variabel kebijakan penyesuaian upah minimum, kekuatan serikat pekerja, serta jumlah kasus pemogokan. Menyoroti dampak gejala disharmoni hubungan industrial di atas, penelitian ini bertujuan menganalisis dampak permasalahan hubungan industrial terhadap perekonomian Indonesia di era otda di masa lalu dan dimasa yang akan datang. Hasil penelitian diharapkan dapat menggambarkan dinamika pasar TK, dampak terhadap kesimbangan ekonomi makro dan langkah-langkah yang perlu dipersiapkan dan ditempuh di masa yang akan datang.

## **METODE PENELITIAN**

Model pasar tenaga kerja dan perekonomian makro terdiri dari enam blok yaitu (1) blok pasar tenaga kerja, (2) blok fiskal, (3) blok penawaran agregat, (4) blok permintaan agregat, (5) blok moneter, dan (6) blok keseimbangan makro. Keterkaitan variabel endogen pada setiap blok diilustrasikan pada Gambar 1.

Model terdiri 52 peubah endogen (G), dan 71 peubah *predetermined variable* (34 peubah eksogen dan 37 *lag endogenous variabel*). Total peubah dalam model (K) adalah 123, jumlah maksimum peubah dalam persamaan (M) adalah 7 peubah. Berdasarkan kriteria *order condition*, setiap persamaan struktural yang ada dalam model adalah *over identified* dan pendugaan dilakukan dengan 2SLS (*Two Stage Least Squares*). Validasi menggunakan kriteria statistik *root mean squares error (RMSE)*, *root means squares percent error (RMSPE)*, dan *theil's inequality coefficient (U)*.



Gambar 1. Model umum pasar tenaga kerja dan perekonomian Indonesia

Penjelasan notasi:

- |  |  |
|--|--|
| SPR = Penawaran tenaga kerja (TK) berpendidikan rendah (ribu orang/tahun)          | GEP = Pengeluaran pembangunan sektor pertanian (miliar rupiah/tahun)             |
| SPM = Penawaran TK berpendidikan menengah (ribu orang/tahun)                       | GEI = Pengeluaran pembangunan sektor industri (miliar rupiah/tahun)              |
| SPT = Penawaran TK berpendidikan tinggi (ribu orang/tahun)                         | GEIS = Pengeluaran pembangunan infrastruktur (miliar rupiah/tahun)               |
| S = Penawaran TK total (ribu orang/tahun)  | GEPK = Pengeluaran pembangunan sektor kesejahteraan sosial (miliar rupiah/tahun) |
| DPRP = Permintaan TK berpendidikan rendah di sektor pertanian (ribu orang/tahun)   | GET = Pengeluaran pembangunan (miliar rupiah/tahun)                              |
| DPRI = Permintaan TK berpendidikan rendah di sektor industri (ribu orang/tahun)    | GDPP = Nilai produksi sektor pertanian (miliar rupiah/tahun)                     |
| DPRJ = Permintaan TK berpendidikan rendah di sektor jasa (ribu orang/tahun)        | GDPJ = Nilai produksi sektor industri (miliar rupiah/tahun)                      |
| DPR = Permintaan TK berpendidikan rendah (ribu orang/tahun)                        | GDPJ = Nilai produksi sektor jasa (miliar rupiah/tahun)                          |
| DPMP = Permintaan TK berpendidikan menengah di sektor pertanian (ribu orang/tahun) | C = Konsumsi (miliar rupiah/tahun)   |
| DPMI = Permintaan TK berpendidikan menengah di sektor industri (ribu orang/tahun)  | IP = Investasi sektor pertanian (miliar rupiah/tahun)                            |
| DPMJ = Permintaan TK berpendidikan menengah di sektor jasa (ribu orang/tahun)      | II = Investasi sektor industri (miliar rupiah/tahun)                             |
| DPM = Permintaan TK berpendidikan menengah (ribu orang/tahun)                      | IJ = Investasi sektor jasa (miliar rupiah/tahun)                                 |
| DPTP = Permintaan TK berpendidikan tinggi di sektor pertanian (ribu orang/tahun)   | TI = Investasi total (miliar rupiah/tahun)                                       |
| DPTI = Permintaan TK berpendidikan tinggi di sektor industri (ribu orang/tahun)    | X = Nilai ekspor (miliar rupiah/tahun)   |
| DPTJ = Permintaan TK berpendidikan tinggi di sektor jasa (ribu orang/tahun)        | M = Nilai impor (miliar rupiah/tahun)  |
| DPT = Permintaan TK berpendidikan tinggi (ribu orang/tahun)                        | MD = Total permintaan uang (miliar rupiah/tahun)                                 |
| DP = Permintaan TK sektor pertanian (ribu orang/tahun)                             | MS = Total penawaran uang (miliar rupiah/tahun)                                  |
| DI = Permintaan TK sektor industri (ribu orang/tahun)                              | SB = Suku bunga (persen/tahun)   |
| DJ = Permintaan TK sektor jasa (ribu orang/tahun)                                  | AD = Permintaan Agregat (miliar rupiah/tahun)                                    |
| D = Permintaan TK total (ribu orang/tahun)   | AS = Produksi Agregat (miliar rupiah/tahun)                                      |
| UPR = Tingkat pengangguran TK berpendidikan rendah (persen/tahun)                  | CPI = Indeks harga konsumen  |
| UPM = Tingkat pengangguran TK berpendidikan menengah (persen/tahun)                | INF = Inflasi nasional (persen/tahun)  |
| UPT = Tingkat pengangguran TK berpendidikan tinggi (persen/tahun)                  | UMP = Upah minimum pertanian (rupiah/tahun)                                      |
| UT = Tingkat pengangguran total (persen/tahun)                                     | UMI = Upah minimum industri (rupiah/tahun)                                       |
| WP = Upah rata-rata sektor pertanian (rupiah/tahun)                                | UMJ = Upah minimum jasa (rupiah/tahun)   |
| WI = Upah rata-rata sektor industri (rupiah/tahun)                                 | UMR = Upah Minimum Rata-rata (rupiah/tahun)                                      |
| WJ = Upah rata-rata (rupiah/tahun)   | TKFP = Jumlah TK di sektor formal pertanian (ribu orang/tahun)                   |
| W = Upah rata-rata (rupiah/tahun)  | TKFI = Jumlah TK di sektor formal industri (ribu orang/tahun)                    |
| TAX = Penerimaan pajak (miliar rupiah/tahun)                                       | TKF = Jumlah TK di sektor formal (ribu orang/tahun)                              |
| GTR = Penerimaan pemerintah total (miliar rupiah/tahun)                            |  |

Simulasi kebijakan era otda yang dilakukan adalah simulasi historis (*ex-post simulation*) tahun 2001-2004 dan simulasi peramalan (*ex-ante simulation*) tahun 2007-2010. Alternatif simulasi kebijakan historis tahun 2001-2004 adalah sebagai berikut:

- Simulasi 1: Upah minimum tetap sebesar tahun 2000 (tidak ada penyesuaian upah minimum sejak tahun 2001)
- Simulasi 2: Penyesuaian UMP, UMI, UMJ, dan UMR dengan diatas rata-rata tingkat inflasi 2001-2004 sebesar 10% (dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja).
- Simulasi 3: Penurunan kekuatan serikat buruh TKFP 90%, TKFI 1,5%, dan TKF 2,5% (dalam rangka peningkatan kontrol pemerintah terhadap kekuatan serikat pekerja dalam menuntut kenaikan upah).
- Simulasi 4: Penurunan kasus pemogokan 50% (upaya pemerintah sebagai mediator agar permasalahan ketenagakerjaan antara pekerja dan pengusaha dapat diselesaikan dengan musyawarah).
- Simulasi 5: Penurunan suku bunga 20% (upaya pemerintah untuk meningkatkan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi).

**Alternatif simulasi kebijakan peramalan tahun 2007-2010 yang dilakukan:**

- Simulasi 1: Upah minimum tetap sebesar tahun 2006 (tidak ada penyesuaian upah minimum sejak tahun 2007).
- Simulasi 2: Penyesuaian UMP, UMI, UMJ, dan UMR dengan diatas rata-rata tingkat inflasi tahun 2007-2010 sebesar 8%.
- Simulasi 3: Penurunan kekuatan serikat buruh TKFP 90%, TKFI 1,5%, dan TKF 2,5%.
- Simulasi 4: Penurunan jumlah kasus pemogokan dan unjuk rasa 50%.
- Simulasi 5: Penurunan suku bunga 20%.
- Simulasi 6: Kombinasi 3 dan 5.
- Simulasi 7: Kombinasi 4 dan 5.

Studi ini menggunakan data sekunder time series tahun 1980-2004. Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dirjen Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja, Bank Indonesia, serta berbagai hasil penelitian yang mempunyai keterkaitan terhadap studi ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil pendugaan model yang digunakan dalam penelitian cukup representatif menjelaskan fenomena ekonomi pasar tenaga kerja (TK) dan perekonomian makro Indonesia. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada masing-masing persamaan umumnya cukup besar (0,711-0,996) yang menunjukkan bahwa peubah-peubah penjelas di dalam model dapat menjelaskan fluktuasi setiap peubah endogennya secara baik. Hasil estimasi pada keseluruhan blok menunjukkan secara umum peubah keragaan dalam persamaan mampu menjelaskan secara bersama-sama keragaan setiap peubah endogennya. Hasil statistik t menunjukkan sebahagian besar peubah penjelas dalam setiap persamaan perilaku berpengaruh nyata terhadap peubah endogennya masing-masing pada taraf nyata atau  $\alpha$  sebesar 25%.

Peningkatan penyesuaian upah minimum rata-rata telah menyebabkan penurunan rata-rata nilai investasi. Dalam jangka pendek, peningkatan penyesuaian upah minimum rata-rata satu% telah menyebabkan penurunan investasi sektor pertanian -0,31%, sektor industri -0,01%, dan sektor jasa -0,13%. Peningkatan kekuatan serikat pekerja sektor industri dalam menuntut kenaikan upah sebesar 1,0% menyebabkan upah rata-rata pekerja di luar target kebijakan upah minimum di sektor industri meningkat sebesar 0,9% (upah sundulan). Hasil penelitian terdahulu juga menyimpulkan bahwa fenomena upah sundulan merupakan dampak dari kekuatan serikat pekerja untuk menaikkan upah buruh diluar target kebijakan upah minimum (Priyono, 2002). Fenomena upah sundulan ini pada akhirnya menimbulkan

beban jika upah yang harus dibayarkan tidak seimbang dengan produktivitas pekerja. Sumber protes keras pengusaha terhadap sundulan upah karena bertentangan dengan prinsip awal penetapan upah minimum melalui kesepakatan. Elastisitas jangka pendek nilai investasi sektoral akibat peningkatan jumlah kasus pemogokan nyata secara statistik. Artinya peningkatan jumlah kasus pemogokan sebesar 1,0% telah menurunkan nilai investasi sektor pertanian -0,13%, sektor industri -0,0002%, dan sektor jasa -0,08%.

## **Dampak Permasalahan Hubungan Industrial di Era Otda**

### **Periode historis tahun 2001-2004**

Validasi model ekonometrika pasar TK dilakukan untuk periode pengamatan 2001-2004 (era otda). Hasil validasi berdasarkan kriteria statistik memiliki nilai RMS % *Error* di bawah 25% (46 persamaan), sementara 7 persamaan memiliki nilai RMS % *Error* 40-63%. Bias (UM), Reg (UR), dan Var (US) secara keseluruhan mendekati nilai nol. Nilai U-Theil secara keseluruhan mendekati nol yang mengindikasikan bahwa simulasi model mendekati data aktualnya dengan baik (Sitepu dan Sinaga, 2006). Kriteria tersebut mengindikasikan bahwa model yang dibangun mempunyai daya ramal cukup valid untuk melakukan simulasi historis dan simulasi peramalan.

Simulasi 1 (Tabel 3) menggambarkan bila pemerintah hanya mempertimbangkan kepentingan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi. Hasil Simulasi 1 memperlihatkan bahwa jika pemerintah tidak melakukan penyesuaian terhadap nilai upah minimum pada era otda, nilai investasi sektor pertanian akan meningkat 611% (meningkat 18.956 miliar rupiah), sektor industri meningkat 66% (meningkat 22.541 miliar rupiah), sektor jasa meningkat 75% (meningkat 2.910 miliar rupiah). Secara total, investasi meningkat 46% atau meningkat 44.407 miliar rupiah.

Simulasi 2 memperlihatkan dampak berbeda dengan simulasi sebelumnya. Jika pemerintah hanya mempertimbangkan kesejahteraan pekerja dengan meningkatkan nilai upah minimum, terjadi penurunan nilai investasi, nilai produksi, dan kesempatan kerja dan pada akhirnya akan meningkatkan tingkat pengangguran total 4,33% (mencapai 9,5%) dan inflasi meningkat 9,54% (mencapai 6,3%).

Simulasi 3, dan 4 menggambarkan penurunan resiko ketidakpastian dalam pasar tenaga kerja. Dampak simulasi berpengaruh langsung pada penurunan upah rata-rata pekerja diluar target kebijakan upah minimum. Selanjutnya upah akan mempengaruhi kesempatan kerja, nilai produksi, dan pada akhirnya mempengaruhi nilai investasi. Penurunan kasus pemogokan (Simulasi 3) secara langsung akan menurunkan faktor ketidak pastian dalam pasar TK. Dampak penurunan kasus pemogokan 50% akan meningkatkan nilai investasi total 2,3%.

Simulasi penurunan suku bunga (Simulasi 5) menggambarkan upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi. Penurunan tingkat suku bunga 20% dapat meningkatkan nilai investasi total 0,01% dan menurunkan tingkat pengangguran total -0,01%. Sementara itu, kombinasi simulasi penurunan tingkat suku bunga dan penurunan resiko ketidakpastian di pasar tenaga kerja (Simulasi 6 dan 7) memperlihatkan

dampak peningkatan nilai investasi total dan penurunan tingkat pengangguran dan penurunan tingkat inflasi yang lebih besar dibandingkan dampak pada Simulasi 5.

Secara umum, dampak kombinasi penurunan tingkat suku bunga dan penyelesaian masalah hubungan industrial dapat menurunkan resiko ketidakpastian di pasar tenaga kerja. Dampak lanjutan dapat memperbaiki kondisi perekonomian makro melalui peningkatan investasi, peningkatan output nasional, penurunan tingkat pengangguran, dan penurunan tingkat inflasi.

Tabel 3. Dampak alternatif simulasi kebijakan periode historis tahun 2001-2004

Peubah endogen	Satuan	Simulasi dasar	Dampak perubahan simulasi (%)				
			Simulasi 1	Simulasi 2	Simulasi 3	Simulasi 4	Simulasi 5
SPR	000 orang	75.835,60	-0,02	0,01	-0,01	0,00	0,00
SPM	000 orang	19.842,30	-0,45	0,51	-0,40	0,00	0,00
SPT	000 orang	6.354,30	-0,24	0,32	-0,26	0,00	-0,01
S	000 orang	102.032,00	-0,12	0,13	-0,10	0,00	0,00
DPRP	000 orang	39.226,30	-0,27	-0,45	0,20	0,00	0,00
DPRI	000 orang	7.985,90	0,71	-0,26	0,23	0,03	0,00
DPRJ	000 orang	3.683,40	0,47	-0,14	0,02	0,02	0,00
DPR	000 orang	71.401,30	-0,05	-0,28	0,14	0,00	0,00
DPMP	000 orang	2.323,80	0,41	-0,91	0,36	-0,01	0,00
DPMI	000 orang	3.203,50	3,07	-1,15	1,07	0,23	0,00
DPMJ	000 orang	3.856,20	0,52	-0,60	0,16	0,03	0,00
DPM	000 orang	16.624,10	0,77	-0,49	0,29	0,05	0,00
DPTP	000 orang	124,50	0,64	-1,29	0,48	-0,08	0,00
DPTI	000 orang	437,40	3,80	-1,49	1,39	0,21	0,00
DPTJ	000 orang	2.472,90	0,82	-0,51	0,11	0,04	0,00
DPT	000 orang	4.327,90	0,88	-0,48	0,22	0,05	0,00
DP	000 orang	41.674,60	-0,23	-0,48	0,21	0,00	0,00
DI	000 orang	11.626,80	1,48	-0,55	0,51	0,10	0,00
DJ	000 orang	10.012,50	0,58	-0,41	0,10	0,03	0,00
D	000 orang	92.353,30	0,14	-0,33	0,17	0,01	0,00
UPR	Persen	4,33	0,56	4,60	-2,24	-0,08	0,00
UPM	Persen	3,15	-6,51	5,47	-3,84	-0,25	-0,01
UPT	Persen	1,97	-2,46	1,89	-1,17	-0,09	-0,03
UT	Persen	9,46	-2,43	4,33	-2,55	-0,14	-0,01
WP	Rupiah	7.438,10	2,01	2,97	-1,31	0,00	0,00
WI	Rupiah	14.719,00	-5,48	2,98	-3,11	0,00	0,00
WJ	Rupiah	19.356,80	0,50	2,72	-0,78	0,00	0,00
W	Rupiah	15.181,40	-2,80	2,56	-2,00	0,00	0,00
TAX	Miliar Rp.	411,70	1,75	-0,24	0,05	0,15	0,00
GTR	Miliar Rp.	596,30	1,21	-0,17	0,02	0,10	0,00
GEP	Miliar Rp.	21,21	-0,19	1,07	-0,89	0,02	-0,10
GEI	Miliar Rp.	2,58	0,59	0,43	-0,42	0,06	-0,05
GEIS	Miliar Rp.	55,92	0,34	0,02	-0,05	0,03	-0,01
GEPK	Miliar Rp.	47,14	0,14	0,29	-0,25	0,02	-0,04
GET	Miliar Rp.	742,60	0,04	0,05	-0,04	0,01	0,00
GDPP	Miliar Rp.	54.478,10	0,87	-0,18	0,03	-0,01	0,00
GDPI	Miliar Rp.	92.133,30	3,77	-0,50	0,09	0,40	0,00
GDPJ	Miliar Rp.	54.131,80	1,59	-0,20	0,00	0,07	0,00
C	Miliar Rp.	235.457,00	0,83	-0,20	0,09	0,07	0,01
IP	Miliar Rp.	3.104,50	610,59	-69,59	0,40	-5,50	-0,12
II	Miliar Rp.	34.051,70	66,20	-7,61	0,12	6,75	0,01
IJ	Miliar Rp.	3.902,30	74,57	-8,60	0,05	2,85	0,20
TI	Miliar Rp.	96.256,90	46,13	-5,29	0,06	2,33	0,01
X	Miliar Rp.	110.417,00	1,34	-0,18	0,03	0,11	0,00
M	Miliar Rp.	94.424,70	1,49	-0,20	0,03	0,13	0,00
MD	Miliar Rp.	1.943,30	12,90	-1,56	0,08	0,72	0,00
MS	Miliar Rp.	1.895,00	14,60	-1,69	0,04	0,81	-0,60
SB	Persen	14,20	-5,30	2,68	-1,74	-0,18	
AD	Miliar Rp.	348.448,00	13,32	-1,60	0,08	0,69	0,01
AS	Miliar Rp.	350.884,00	1,37	-0,19	0,03	0,12	0,00
CPI		262,20	-0,76	1,18	-0,95	0,00	-0,15
INF	Persen	6.2418	-8,03	9,54	-7,65	-0,01	-0,87

Sumber: Data sekunder 1980-2004 (diolah)

### Periode peramalan tahun 2007-2010

Hasil simulasi dasar tanpa alternatif kebijakan tahun 2007-2010 diperkirakan nilai produksi agregat dan nilai investasi total semakin meningkat. Namun, tingkat pengangguran total diperkirakan juga akan semakin meningkat mencapai 11,49%

tahun 2007-2010. Kondisi tersebut disebabkan oleh rata-rata pertumbuhan output nasional (2,91%) masih lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan kelebihan penawaran TK (10,81%). Sumber permasalahan dampak tersebut adalah peningkatan upah minimum yang tidak dibarengi dengan peningkatan produktivitas pekerja. Peningkatan upah minimum pada produktivitas TK yang relatif konstan meningkatkan biaya rata-rata produksi (harga jual), menurunkan volume produksi yang pada akhirnya justru menurunkan kesempatan kerja. Studi ini melakukan beberapa simulasi peramalan dampak penurunan faktor resiko ketidakpastian pasar TK dalam upaya meningkatkan investasi. Peningkatan investasi diharapkan mampu menambah kapasitas produksi dan meningkatkan nilai produksi agregat dan pada akhirnya diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja.

Tabel 4. Dampak alternatif simulasi kebijakan periode peramalan tahun 2007-2010

Peubah endogen	Satuan	Nilai dasar	Dampak perubahan simulasi (%)							
			Simulasi 1	Simulasi 2	Simulasi 3	Simulasi 4	Simulasi 5	Simulasi 6	Simulasi 7	
SPR	000 orang	81469,61	-0,02	0,01	-0,08	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00
SPM	000 orang	25018,79	-0,43	0,42	-2,52	0,00	0,00	0,00	-2,52	0,00
SPT	000 orang	8341,34	-0,26	0,26	-1,53	0,00	0,00	0,00	-1,53	0,00
S	000 orang	114829,75	-0,12	0,12	-0,71	0,00	0,00	0,00	-0,71	0,00
DPRP	000 orang	40061,16	1,74	-0,63	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
DPRI	000 orang	9407,54	-0,04	-0,19	1,79	0,04	0,00	0,00	1,79	0,04
DPRJ	000 orang	3661,42	0,24	-0,17	0,29	0,02	0,00	0,00	0,29	0,02
DPR	000 orang	77022,89	0,91	-0,36	0,29	0,01	0,00	0,00	0,29	0,01
DPMP	000 orang	2903,05	2,55	-0,99	0,17	0,00	0,00	-0,01	0,16	0,00
DPMI	000 orang	3836,74	-0,12	-0,90	7,76	0,26	0,00	-0,02	7,73	0,24
DPMJ	000 orang	4688,66	0,93	-0,60	1,47	0,02	0,00	0,00	1,47	0,02
DPM	000 orang	20536,55	0,55	-0,45	1,81	0,05	0,00	0,00	1,80	0,05
DPTP	000 orang	152,53	3,37	-1,37	0,25	0,01	-0,01	0,00	0,24	0,00
DPTI	000 orang	507,85	-0,24	-1,15	10,72	0,25	-0,02	0,00	10,70	0,23
DPTJ	000 orang	3362,01	0,71	-0,45	1,01	0,03	0,00	0,00	1,01	0,03
DPT	000 orang	5586,86	0,50	-0,41	1,59	0,04	0,00	0,00	1,59	0,04
DP	000 orang	43116,75	1,80	-0,65	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
DI	000 orang	13752,13	-0,07	-0,42	3,78	0,11	-0,01	0,00	3,77	0,10
DJ	000 orang	11712,08	0,65	-0,42	0,97	0,02	0,00	0,00	0,97	0,02
D	000 orang	103146,30	0,82	-0,38	0,67	0,02	0,00	0,00	0,66	0,02
UPR	Persen	3,87	-15,89	6,20	-5,81	-0,13	0,00	0,00	-5,81	-0,13
UPM	Persen	3,90	-4,75	4,23	-21,55	-0,26	0,00	0,00	-21,55	-0,19
UPT	Persen	2,39	-1,68	1,36	-7,02	-0,10	0,00	0,00	-7,02	-0,10
UT	Persen	10,16	-8,27	4,31	-12,16	-0,17	0,00	0,00	-12,16	-0,17
WP	Rupiah	9233,99	-9,81	3,45	-0,63	0,00	0,00	0,00	-0,63	0,00
WI	Rupiah	16574,75	0,87	2,27	-25,20	0,00	0,00	0,00	-25,20	0,00
WJ	Rupiah	23249,50	-4,95	2,81	-7,65	0,00	0,00	0,00	-7,65	0,00
W	Rupiah	17653,91	-2,57	2,30	-13,96	0,00	0,00	0,00	-13,96	0,00
TAX	Miliar Rp.	551,39	0,12	-0,17	0,20	0,15	-0,01	0,00	0,19	0,14
GTR	Miliar Rp.	706,37	0,10	-0,14	0,16	0,12	-0,01	0,00	0,15	0,11
GEP	Miliar Rp.	21,30	-0,62	0,80	-4,75	0,04	0,00	0,00	-4,76	0,04
GEI	Miliar Rp.	2,60	-0,29	0,10	-2,31	0,00	-0,19	0,00	-2,22	0,00
GEIS	Miliar Rp.	50,76	-0,01	0,00	-0,30	0,05	-0,01	0,00	-0,31	0,04
GEPK	Miliar Rp.	57,66	-0,14	0,16	-1,09	0,03	-0,01	0,00	-1,10	0,02
GET	Miliar Rp.	796,16	-0,03	0,03	-0,23	0,01	0,00	0,00	-0,23	0,01
GDPP	Miliar Rp.	62496,51	0,29	-0,17	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
GDPI	Miliar Rp.	121268,55	0,19	-0,35	0,59	0,42	-0,02	0,00	0,56	0,40
GDPJ	Miliar Rp.	65715,49	0,08	-0,17	0,04	0,06	0,00	0,00	0,04	0,06
C	Miliar Rp.	287961,05	0,10	-0,14	0,44	0,07	0,00	0,00	0,43	0,06
IP	Miliar Rp.	2572,74	55,90	-76,43	2,67	3,19	-5,24	0,00	-4,76	-2,10
II	Miliar Rp.	56994,31	3,37	-4,11	0,48	5,89	-0,20	0,00	0,14	5,69
IJ	Miliar Rp.	3716,59	4,24	-8,76	0,37	3,40	-0,11	0,00	0,15	3,29
TI	Miliar Rp.	125639,79	2,80	-3,69	0,28	2,84	-0,20	0,00	-0,03	2,63
X	Miliar Rp.	137410,26	0,10	-0,14	0,17	0,12	-0,01	0,00	0,16	0,12
M	Miliar Rp.	123253,52	0,10	-0,15	0,17	0,13	-0,01	0,00	0,16	0,12
MD	Miliar Rp.	2521,37	0,75	-1,10	0,38	0,83	-0,23	0,00	0,05	0,10
MS	Miliar Rp.	2498,76	0,81	-1,18	0,17	0,92	0,16	0,00	0,48	1,09
SB	Persen	15,28	-1,57	1,95	-8,67	-0,31	0,00	0,00	-8,67	-0,31
AD	Miliar Rp.	428553,74	0,89	-1,18	0,38	0,88	-0,06	0,00	0,29	0,82
AS	Miliar Rp.	432438,95	0,11	-0,15	0,17	0,13	-0,01	0,00	0,16	0,12
CPI	Persen	375,69	-0,77	0,89	-5,05	0,00	-0,02	0,00	-5,06	-0,02
INF	Persen	6,64	-6,70	6,70	-41,11	0,00	0,04	0,00	-40,96	0,00

Sumber: Data sekunder 1980-2004 (diolah)

Simulasi 1 dan 2 (Tabel 4) memperlihatkan perbedaan dampak terhadap perekonomian. Jika pemerintah hanya mempertimbangkan peningkatan pertumbuhan ekonomi makro melalui peningkatan investasi, pekerja akan dirugikan karena nilai upah rendah menurunkan kesejahteraan pekerja sementara pengusaha akan diuntungkan. Sebaliknya, jika pemerintah memihak pada peningkatan kesejahteraan pekerja (Simulasi 2), kelangsungan usaha akan terhambat, nilai investasi menurun, dan tingkat pengangguran dan inflasi meningkat (artinya perekonomian makro semakin memburuk).

Simulasi 3, 4, dan 5 memperlihatkan dampak yang relatif baik pada kondisi perekonomian makro. Penurunan kekuatan serikat pekerja dalam menuntut kenaikan upah dapat memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan penyesuaian terhadap biaya rata-rata meskipun upah minimum meningkat. Penurunan jumlah kasus pemogokan dan penurunan tingkat suku bunga berpengaruh langsung terhadap peningkatan nilai investasi. Selanjutnya, peningkatan investasi akan meningkatkan produksi agregat, memperluas kesempatan kerja, menurunkan tingkat pengangguran, dan menurunkan tingkat inflasi.

Kombinasi Simulasi 6 dan 7 memperlihatkan dampak yang secara umum baik terhadap perekonomian. Diperkirakan kombinasi simulasi tersebut dapat meningkatkan nilai investasi dan produksi agregat serta menurunkan tingkat pengangguran dan inflasi. Namun, jika dibandingkan dengan Simulasi 3 dan 4 memberikan dampak lebih baik dilihat dari segi peningkatan nilai investasi dan produksi agregat serta penurunan tingkat pengangguran dan inflasi. Perbedaan dampak tersebut disebabkan adanya efek *crowding out* yang besar jika peningkatan nilai investasi dilakukan melalui instrumen penurunan suku bunga.

Secara umum dapat dikatakan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan pekerja melalui peningkatan upah minimum tanpa dibarengi peningkatan produktivitas pekerja berdampak pada terhambatnya kelangsungan usaha yang pada akhirnya mempersempit kesempatan kerja dan memperburuk kondisi perekonomian makro.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Permasalahan kebijakan penyesuaian upah minimum, peningkatan kekuatan serikat pekerja, serta peningkatan jumlah kasus pemogokan berpengaruh nyata terhadap penurunan investasi dan produksi agregat serta peningkatan tingkat pengangguran dan tingkat inflasi jika dibandingkan dengan instrumen penurunan suku bunga.

Permasalahan hubungan industrial menggambarkan peningkatan faktor ketidakpastian dalam pasar TK dan telah berdampak pada penurunan investasi dan produksi agregat serta peningkatan tingkat pengangguran dan tingkat inflasi di era otda 2001-2004.

Diperkirakan upaya mencari solusi penyelesaian masalah hubungan industrial tahun 2007-2010 akan lebih efektif untuk menstimulasi peningkatan investasi dan produksi agregat serta penurunan tingkat pengangguran dan tingkat inflasi.

## Saran

Agar masalah hubungan industrial dapat mencapai penyelesaian yang memenuhi harapan pihak pekerja dan pengusaha, diperlukan peran pemerintah sebagai regulator dan mediator yang adil untuk meningkatkan kepercayaan kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Depnakertrans. 1998-2005. *Depnakertrans situasi tenaga kerja dan kesempatan kerja di Indonesia*. Jakarta: Depnakertrans RI.
- Depnakertrans dan BPPS. 1999. *Analisis Program Aksi Penanggulangan Pengangguran*. Jakarta: BPS.
- Graziano A M, Raulin M L. 1989. *Research methods: a process of inquiry*. New York: Harper Collins Publishers.
- Mangkuprawira S. 2000. Analisis perilaku pasar kerja di wilayah Jawa dan Bali. *Mimbar Sosek*. (13)1: 60-78.
- Oentarto S M, Suwandi I M, Riyadmadji D. 2004. *Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan*. Jakarta: Samitra Media Utama.
- Pindyck RS, Rubinfeld DL. 2001. *Microeconomics*. Fifth Edition. New Jersey: Prentice Hall International, Inc.
- Priyono E. 2002. Situasi ketenagakerjaan Indonesia dan tinjauan kritis. *Jurnal Analisis Sosial*. (7)1: 1-15.
- Romer D. 1996. *Advance Macroeconomics*. United State of America: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Setiawan U. 2007. Nasib Buruh dan Reformasi Agraria. Dalam: Kompas. Senin 7 Mei 2007.
- Simanjuntak DS. 2005. Upah Kompromi 2006. *Kompas*. Senin 21 November 2005.
- Sitepu RK, Sinaga BM. 2006. *Aplikasi Model Ekonometrika: Estimasi, Simulasi, dan Peramalan Menggunakan Program SAS*. Bogor: Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Squire L. 1982. *Kebijaksanaan Kesempatan Kerja di Negeri-negeri Sedang Berkembang: Sebuah Survey Masalah-masalah dan Bukti-bukti*. Jakarta: UI-Press.
- Sultani. 2007. Pekerja dalam Pusaran Negara dan Pengusaha. Dalam: Kompas. Senin 7 Mei 2007.
- Suryahadi A, Widyanti W, Penwira D, Sumarto S. 2003. Minimum wage policy and its impact on employment in the urban formal sector. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. (39)1: 29-50.

- Syamsudin MS. 2003. *Efektivitas Penetapan upah Minimum dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja*. Jakarta: Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi Depnakertrans.
- Wirahyoso B. 2002. Upah minimum bagi buruh dan strategi perjuangan serikat pekerja/serikat buruh. *Jurnal Analisis Sosial*. (7)1:77-93.
- Zavodny M. 2000. The effect of the minimum wage on employment and hours. *Labour Economics*. (7)7:29-750.